

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era globalisasi tugas dan tanggung jawab pemerintah terus meningkat karena adanya tuntutan masyarakat untuk menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, murah, serta baik. Globalisasi telah mengubah lanskap ekonomi, sosial, dan politik di seluruh dunia, dengan masyarakat yang semakin terhubung dan berkomunikasi dengan mudah melalui teknologi informasi dan transportasi yang berkembang pesat.

Tuntutan masyarakat yang dihasilkan oleh globalisasi mencakup kebutuhan akan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan baik. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dan harapan akan pemerintah yang responsif dan efisien. Masyarakat menginginkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang efektif, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur, dan administrasi publik.

Seiring upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah harus menyediakan prasarana sebagai bentuk pelayanan, serta pelaksanaan pembangunan. Pendayagunaan aparatur Negara seiring mewujudkan administrasi Negara untuk mampu mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menginginkan pemerintah memperhatikan serta memberantasi *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)*, sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dan menyediakan *good public services* kepada masyarakat.

Tata Pemerintahan yang baik yakni Penyelenggaraan serta pengaturan Negara yang dituntut harus sejalan dengan kemajuan pengetahuan di era globalisasi. Untuk menciptakan *good governance*, maka Negara Indonesia berusaha untuk

mewujudkan aturan hukum (*laws*) serta membentuk berbagai organisasi pelaksana pemerintahan agar terwujudnya *good governance*. Penerimaan maupun pengeluaran keuangan Negara diatur dalam undang-undang anggaran melalui usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keuangan Negara merupakan hal yang penting bagi lembaga maupun instansi dalam mengatur dan mengelola kas Negara sebagai bentuk pembangunan masyarakat. Jika hal ini tidak dilaksanakan dengan baik akan berdampak fatal terhadap tujuan Negara. Salah satu asas keuangan Negara yang akuntabel yakni setiap pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara efektif dalam pelaksanaan program.

Pengelolaan keuangan negara dalam ranah perbendaharaan semakin familiar dengan penggunaan teknologi. Kemajuan teknologi dan penurunan biaya kapasitas pemrosesan komputasi, penyimpanan data, dan kecepatan konektivitas secara mendasar telah membentuk dan mempengaruhi berbagai jenis pengelolaan keuangan negara. Kemajuan teknologi ini memberikan kemudahan pengelola keuangan dalam memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang tercantum dalam undang-undang.

Untuk meningkatkan upaya mendukung terwujudnya akuntabilitas yang sesuai dengan *good governance*, maka pemerintah Indonesia memanfaatkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan pemerintahan. Guna meningkatkan pelayanan, pemerintah menciptakan suatu sistem berbasis teknologi informasi terintegrasi antar lembaga pemerintahan, sehingga pemerintah menerapkan sebuah konsep *E-Government* pada setiap tingkatan instansi pemerintah.

*E-Government* merupakan sebuah proses pemanfaatan teknologi informasi guna membantu pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan secara efisien serta dapat meningkatkan hubungan pemerintah antar pihak lain. *E-Government* adalah upaya pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Standarisasi pengelolaan *E-Government* di Indonesia sudah mulai di standarisasi guna untuk mendapatkan sistem *E-Government* yang berkualitas.

Salah satu contoh penerapan *E-Government* di lingkungan organisasi pemerintah yakni pada penelitian oleh Alqi Faizah tahun 2022 yang berjudul Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Banyudono Kecamatan Dukun sudah berjalan dengan efektif dan efisien dalam membantu Pemerintah Desa Banyudono dalam mengelola keuangan desa. Prosedur pengelolaan keuangan yang dijalankan meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan/Pertanggungjawaban. Namun dalam pengoperasiannya masih terdapat kendala yang tidak terlalu berpengaruh secara signifikan yaitu adanya sistem yang *error* disaat sedang digunakan sehingga menghambat proses penginputan data. Sistem keuangan desa sangatlah berpengaruh penting dalam pemerintahan desa dimana dengan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik akan tercipta akuntabilitas dan transparansi yang optimal.

Pemerintah Indonesia mengakui bahwa Sistem Informasi (SI) merupakan peranan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) dengan membentuk layanan publik dan kemajuan teknologi dalam wadah penerapan layanan elektronik atau disebut dengan *E-Government*. Dalam bidang keuangan negara, *E-government* diterapkan dalam bentuk *Integrated Financial Management Information System (IFMIS)*. Penerapan IFMIS bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dapat muncul dalam penggunaan sistem manual maupun sistem yang terpisah dalam pengelolaan anggaran maupun proses akuntansinya.

Dalam acara *Launching Digital Exhibition* Perbendaharaan dan *Rollout SAKTI* di Jakarta, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa Kementeriannya akan terus berupaya mengembangkan, memperbaiki, serta menciptakan inovasi sistem data digital terkait keuangan negara. Transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan ini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan keuangan dan anggaran negara yang modern dapat dilihat dari

peningkatan transformasi digital di lingkungan kementerian. Inovasi sistem yang dilakukan Kementerian Keuangan adalah dengan menerapkan penyederhanaan sistem yang jumlahnya sangat banyak pada setiap satuan kerja menjadi satu aplikasi dalam satu basis data pula. Tujuannya untuk meminimalisir adanya pengulangan kerja saat input data.

Salah satu inovasi penggabungan basis data yang di implementasikan baik di lingkungan satuan kerja untuk administrasi keuangan antara lain seperti Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), serta Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Satuan Kerja (Satker) dalam pengelolaan keuangan negara menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Setidaknya ada 9 aplikasi yang digunakan terdiri dari SAS, SIMAK-BMN, Persediaan, RKA K/LDIPA, SiLabi, SAIBA, e-Rekon, Pin PPSPM, dan Renkas. Banyaknya aplikasi yang digunakan membuat Satker merasa terbebani karena harus menguasai semua aplikasi tersebut, karena tidak semua Satker mempunyai sumber daya yang memadai.

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan tersebut, Kementerian Keuangan mengembangkan sebuah sistem aplikasi yang memiliki integritas tinggi diperuntukkan untuk seluruh satuan kerja (satker) instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan nama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem ini dapat mengintegrasikan proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara. SAKTI dikeluarkan karena pemerintah berupaya mendukung pengelolaan keuangan negara yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, terintegritasi dan berbasis kinerja (Amriana & Iskandar, 2019).

Pengembangan ide SAKTI dibangun melalui penyederhanaan aplikasi sistem pengelolaan keuangan negara yang digunakan sebelumnya. Aplikasi SAKTI mampu mengintegrasikan berbagai aplikasi eksisting yang digunakan saat

ini, seperti Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Aplikasi Persediaan, Sistem Aplikasi Satker (SAS), dan Sistem Informasi Berbasis Akrual (SAIBA) menjadi satu kesatuan dalam aplikasi tunggal. Sesuai dengan kerangka waktu implementasi SAKTI, program SAKTI mulai dilaksanakan tahun 2015 dengan piloting 12 Satker di Kemenkeu dan Satker SPAN (Mukhtaromin, 2018). Perlu diperhatikan juga terkait penelitian yang dikembangkan oleh (Novelia, 2023) yang menyatakan bahwa kualitas sistem dan kualitas layanan mempunyai pengaruh paling besar terhadap kepuasan pengguna, SAKTI harus memperhatikan kualitas sistem khususnya *response time* dan kemudahan penggunaan (*ease of use*) untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan kinerja pengguna.

SAKTI muncul di latarbelakangi oleh permasalahan pengelolaan anggaran dalam kementerian yang masih bersifat *offline* dan pada tahun 2013 banyak terjadinya kesalahan data yang disebabkan oleh sistem, sehingga mendorong kementerian keuangan untuk menerapkan aplikasi berbasis *online* pada tahun 2018, seluruh lingkungan otoritas kementerian keuangan menerapkan SAKTI sebagai aplikasi pengolahan dan perbendaharaan. SAKTI dikembangkan secara bertahap mulai dari studi kelayakan, analisis kebutuhan, desain aplikasi dan pengembangan fungsi aplikasi. Pada tahun 2021, penerapan *full* modul SAKTI diperluas ke seluruh kementerian atau lembaga untuk penganggaran APBN tahun 2022. Kementerian keuangan akan terus mengembangkan aplikasi SAKTI ini guna meningkatkan efisiensi kerja instansi pemerintah (Ismail & Utama, 2022).

Implementasi SAKTI banyak memunculkan tantangan dan permasalahan. Diperlukan upaya sistematis seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga agar sistem ini dapat diterapkan dengan baik. Terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan stabilitas sistem, kualitas output, teknis penggunaan, hingga layanan dukungan SAKTI pada tahap piloting awal. (Nasrudin & Widagdo, 2020) menyatakan terdapat beberapa permasalahan terkait dengan fitur aplikasi yang rumit, sinyal internet yang tidak stabil, laporan yang belum bisa ditampilkan

dengan utuh, pelatihan teknis yang minim, komunikasi admin dengan operator yang kurang, baik pusat dan daerah serta masalah-masalah lainnya.

Pada tahun 2015, SAKTI mulai di implementasikan secara bertahap. Pada tahap *piloting*, ditemukan permasalahan seperti teknis penggunaan, kualitas sistem, aksesibilitas, kualitas *output* serta layanan dukungan SAKTI sebagaimana temuan penelitian Haryu Pambudi & Adam (2015) pada objek penelitian satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

Masalah lain yang terjadi pada aplikasi SAKTI menurut (Tiara Sabrina, 2023) ketidakstabilan aplikasi meskipun pada akhirnya kendala tersebut dapat diselesaikan. Kekurangan pada aplikasi keuangan yakni SAKTI terjadi karena proses pengembangan aplikasi yang dilakukan secara cepat dengan pengembangan sistem yang cepat ini terdapat beberapa kondisi yang kurang seimbang. Masalah lain juga muncul pada aplikasi SAKTI menurut (Saepulloh, 2022) seringkali penggunaan SAKTI mengalami *loading* lama ketika akses menu suatu modul. Hal tersebut dimungkinkan karena jaringan internet di lingkungan satuan kerja yang kurang memadai maupun dikarenakan *load* yang besar saat mengakses dari para pengguna SAKTI yang memberatkan kerja *server*. Sehingga perlu adanya tindak lanjut berupa penonaktifan sementara menu tertentu untuk mengurangi *load* besar secara bersamaan. Selain itu, basis *web* pada SAKTI membuat pengembang aplikasi sering melakukan perbaikan (*update system*), perbaikan pada aplikasi SAKTI membuat pengguna tidak dapat mengakses aplikasi diwaktu-waktu tertentu, hal tersebut tentunya mempengaruhi kinerja pengguna dalam proses pengelolaan keuangan dan menghambat pekerjaan.

Aplikasi ini terus mengalami penyempurnaan dan pengembangan sesuai perkembangan zaman. Pada tahun 2019, SAKTI *Website* atau yang sering disebut SAKTI *Web* mulai digunakan oleh beberapa satuan kerja karena memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan SAKTI *desktop*. Kelebihan dari SAKTI *Web* terutama sangat dirasakan di masa Pandemi COVID-19. Tidak ada batasan tempat dan waktu bagi pengelola keuangan dalam menjalankan tugasnya. Pada tahun 2021 SAKTI *Web Full Module* terdiri dari beberapa modul, antara lain:

Modul Administrasi, Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Piutang, Modul Akuntansi dan Pelaporan, Modul Aset Tetap, dan Modul Persediaan. Dilakukan berbagai sosialisasi dan pelatihan yang diikuti oleh seluruh pengelola keuangan dalam satuan kerja untuk menyiapkan pengelola keuangan dalam menggunakan aplikasi SAKTI *Web Full Module* tersebut.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu instansi satuan kerja dibawah kementerian keuangan yang menerapkan aplikasi SAKTI. Aplikasi SAKTI ini sudah diterapkan sejak awal tahun 2022 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis. Sebelum adanya aplikasi SAKTI berbasis *online* ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis menggunakan 7 buah aplikasi dengan *database* terpisah tetapi memiliki keterkaitan antar sama lain yaitu Aplikasi RKAKL, Aplikasi DIPA, Aplikasi SPM, Aplikasi SISKKA, Aplikasi SIMAK-BMN, Aplikasi Persediaan, dan Aplikasi SAKPA. Namun, karena masih terpisah-pisah, akibatnya terdapat duplikasi data dan fungsi di antara aplikasi tersebut. Oleh karena itu pada akhir tahun 2021, kementerian keuangan menghadirkan sebuah aplikasi yakni SAKTI dengan *database* terintegrasi.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang awalnya berbasis *offline database* terpisah ke *database online* terintegrasi tentu memerlukan kesesuaian dan kesiapan pengguna dalam mengimplementasikan aplikasi SAKTI. Perlunya peran SDM dan perangkat pendukungnya yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi aplikasi SAKTI. Dikarenakan aplikasi SAKTI merupakan aplikasi yang masih baru, perlu ditinjau kesiapan pengguna dalam mengimplementasikan aplikasi SAKTI yang berbasis *online* terintegrasi ini yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pengguna dan mengetahui kesiapan pengguna dalam pengaplikasian SAKTI pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis.

Selain itu SAKTI berhubungan erat dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). SIA membantu memproses, menyimpan, dan melaporkan informasi keuangan secara efektif. Dengan menerapkan konsep SIA seperti *people*,

*procedure, data, software, information technology infrastructure* dan pengendalian internal, dapat memastikan bahwa implementasi SAKTI dilakukan dengan baik, melibatkan orang-orang yang tepat, menggunakan prosedur yang efisien, data yang akurat, perangkat lunak yang sesuai, infrastruktur teknologi yang memadai, dan adanya kontrol internal. Sehingga membantu dalam meningkatkan manajemen dan akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan terkait pengimplementasian SAKTI pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis berdasarkan delapan konsep Sistem Informasi Akuntansi (SIA) meliputi Tujuan, Input, Output, Penyimpan data, Pemroses data, Instruksi dan prosedur, Pemakai, Pengawasan dan pengamanan. Peneliti ingin membahasnya lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja faktor pendukung Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis?
3. Apa saja faktor penghambat Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, serta berdasarkan proses penelitian yang dilakukan peneliti, Maka peneliti membatasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yang mana dalam hal ini peneliti akan menganalisis implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis berdasarkan enam konsep Sistem Informasi Akuntansi (SIA) seperti

Tujuan, Input, Output, Penyimpan data, Pemroses data, Instruksi dan prosedur, Pemakai, Pengawasan dan pengamanan, beserta faktor pendukung dan penghambat nya.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, dapat memperkaya konsep atau teori yang mendorong perkembangan keberhasilan penerapan *E-Government* di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Bengkalis. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor kesuksesan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Suatu Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan informasi yang berguna dalam pengembangan SAKTI tentang dimensi apa saja yang seharusnya menjadi prioritas perbaikan untuk meningkatkan performa SAKTI serta meminimalisir kendala dalam implementasi SAKTI

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan *E-Government* dan pengelolaan keuangan negara di instansi pemerintah daerah.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas isi dari bagian per bagian pada laporan skripsi penelitian yang disusun sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

### **BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

### **BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisa data dari penelitian yang telah dilakukan.

### **BAB 5 : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**